

Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/abdimitu>

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar

|ISSN xxxx-xxxx |



Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Etika Dan Budaya Dalam Berpolitik

Asmaul Husna^{1*}, Eza Aulia¹, Yuhdi Fahrimal¹, Cut Asmaul Husna¹, Reni Juliani¹

1) Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Corresponding author: asmaulhusna@utu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 31-10-2022
Revised: 23-11-2022
Accepted: 30-11-2022
Available online: 20-12-2022

A B S T R A K

Pancasila sebagai sumber etika politik, oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana implementasinya di dalam kehidupan mereka, terutama bagi masyarakat yang ingin terjun di dunia politik. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian ini diselenggarakan guna membawa perubahan positif bagi para pesertanya yang merupakan masyarakat Simeulue, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai politik semakin meningkat. Pelaksanaannya kegiatan pengabdian ini terbagi dalam 2 sesi dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Di mana setiap sesinya peserta akan diberikan pretest dan post test yang sebarakan melalui google form. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan membawa perubahan positif bagi para pesertanya, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai politik semakin meningkat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dengan kata lain, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan yang lebih jauh adalah mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

Kata Kunci: Implementasi; Pancasila; Etika; Budaya; Politik.

A B S T R A C T

Pancasila is a source of political ethics. Therefore, people need to know how to implement it in their lives, especially for people who want to enter the world of politics. Therefore, this service activity is held to bring positive changes to the participants. At least their understanding of politics is increasing. The implementation of this service activity is divided into two sessions with lecture methods and interactive dialogue. In each session, participants will be given a pretest and post-test, distributed via a google form. The results of the service activities brought positive changes to the participants. At least their understanding of politics was increasing by implementing the values of Pancasila in it. In other words, those who do not know become aware, those who already know become more aware, and what is further is that they will apply that understanding in their daily lives.

Keywords: *Implementation; Pancasila; Ethics; Culture; Political.*

PENDAHULUAN

Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia bukan sekedar merupakan suatu konsensus politik para pendiri bangsa, melainkan sebagai *staatsfundamentalnorm*, di mana berdasarkan yuridis formal, Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar negara yang diletakkan pada bagian preambule pembukaan UUD 1945. Hal tersebut menjadikan Pancasila berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada. (Mustafa Bachsan, 2003:114)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai: (H.A.W. Widjaja, 2000:3-4)

1. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan;
2. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, nilai positif;
3. Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Pada perkembangannya, Pancasila menjadi suatu konsensus filsafati yang mengandung komitmen-komitmen yang menjanjikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa Pancasila dengan kelima silanya sebagai satu kesatuan dan keutuhan, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan etika sosial bangsa Indonesia, termasuk etika politik. (Syamsudin, dkk, 2009:135)

Terkait dengan etika politik, terdapat beberapa hal utama yang menjadi pegangan bagi teori politik dan perilaku politik yang etis, antara lain, sebagai berikut: (Hendra Nurtjahjo, 2006:27-28)

1. Menghargai kehidupan, hak hidup (nyawa) dan harta milik setiap individu manusia tanpa terkecuali;
2. Menghargai kebebasan dengan derivatifnya sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaannya;

3. Mengupayakan dalam menerapkan prinsip utilitarianisme, yaitu mengusahakan akibat-akibat baik (bagi kemanusiaan) dan sedapat mungkin mencegah akibat-akibat buruk dan tindakan atau keputusan yang diambil.
4. Menghargai persamaan dengan segala derivatifnya, dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif (*nature*) dari individu-individu dalam konteks sosial. Secara teoritis prinsip kesempatan yang adil (*equally open*) dikombinasikan dengan prinsip perbedaan untuk mencapai keuntungan bersama setiap orang dalam perspektif demokrasi yang etis;
5. Keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik, kemudian diproses dengan unsur lokal yang patut pula diutamakan, seperti nilai tentang persatuan bangsa.
6. Keputusan dan tindakan politik secara bertingkat harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. Prioritas untuk memiliki legitimasi etis (dengan ukuran etika-etika dasar dan etika politik secara mendasar).
 - b. Memiliki legitimasi sosiologis, dalam arti persetujuan sosial dapat merupakan suara mayoritas dari suatu dewan etik, bisa pula suara mayoritas dari dewan perwakilan pada umumnya.
 - c. Memiliki legitimasi yuridis dalam pengertian dasar legalitas konstitusional yang telah disepakati bersama sebelumnya melalui proses keadilan prosedural.

Sebagai suatu sistem nilai, sesungguhnya Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia secara substansial, nilai-nilai yang dikandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri, hal yang demikian dapat dijabarkan sebagai berikut: (Paulus Wahana, 1993:77-78)

1. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi yang berhasil ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang sistematis dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia;
3. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai moral yang secara aktual dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia;
4. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 tampak masih begitu umum dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan kita;
5. Nilai-nilai Pancasila harus dicari dan ditemukan dalam rumusan Pancasila, bahkan nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk dapat diwujudkan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dihindari untuk tidak menimbulkan perpecahan yang dapat merugikan setiap orang bahkan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan di sekitarnya. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan dan pedoman untuk memimpin suatu bangsa dan kehidupan berbangsa di negara yang beragam budaya.

Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) mengandung nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan, agama, keadilan, dan kebangsaan. Kandungan nilai Pancasila yang terkandung dalam Perintah Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, perintah pertama ini erat kaitannya dengan kehidupan beragama. Bagaimana kita bisa bebas menjalankan agama menurut ajaran agama tertentu (Sudirman dan Sarjito, 2021:286).

Sila Kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) mencakup pentingnya menghormati orang lain, tetapi semua masyarakat memiliki banyak perbedaan. Nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya menyampaikan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pedoman berperilaku harus sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Nilai harus berkinerja baik dan nilai tidak menyimpang dari makna sebenarnya (Rianto, 2016: 84).

Sila Ketiga (Persatuan Indonesia). Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menempatkan solidaritas, kohesi, kepentingan dan keamanan nasional dan nasional di atas kolektif dan individu. Mendahulukan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam semangat yang membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme. Selalu mengutamakan negara dan kepentingan nasional di atas segalanya. Menumbuhkan perilaku ini berarti menumbuhkan kebanggaan terhadap tanah air kita Indonesia, yang memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat bertahan dengan ideologinya dengan mempertahankan kesatuannya secara keseluruhan. Nilai persatuan adalah obat paling mujarab untuk mewujudkan cita-cita persatuan bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjaga solidaritas yang ada di negara ini. Meski banyak perbedaan, tetap ada persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hanafi, 2018: 56).

Sila Keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dan konsensus. Artinya asas musyawarah untuk mufakat diwakili oleh wakil dan badan perwakilannya dalam memperjuangkan amanat rakyat. Pandangan ini membenarkan bahwa demokrasi di republik ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat mengandung rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, menjamin dan mempererat persatuan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Keberadaan demokrasi berdasarkan semangat Pancasila memastikan bahwa warga negara saling memandang, menghormati dan menerima satu sama lain, bersatu dan bekerja sama untuk kebaikan bersama 'masyarakat' atau 'bangsa' (Yusdiyanto, 2016: 260).

Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia perlu menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong, sikap dan suasana. Oleh karena itu, perlu kesadaran untuk memperlakukan orang lain secara adil, melindungi hak dan kewajibannya, serta menghormati martabatnya. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku bagi masyarakat dalam segala bidang kehidupan material dan spiritual. Masyarakat Indonesia diperlakukan secara adil dalam berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, politik, pendidikan, budaya dan masyarakat. Keadilan sosial berarti menyeimbangkan kehidupan individu dan komunal. Karena kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan mencakup keadilan yang memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (Lestari, Sunarto, dan Cahyono, 2020: 136-137).

Pancasila sebagai sistem etika memuat dasar penilaian benar dan salah berdasarkan nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam realitas sosial, agama, dan

budaya bangsa Indonesia, namun nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dan diterima oleh semua orang setiap saat.

Tema etika dan budaya politik dalam perspektif Pancasila perlu dikaitkan secara kontekstual dengan permasalahan klasik fundamental dan aktual sedemikian rupa, sehingga pembekalan dalam perluasan wawasan terkait cara menghadapi kenyataan problematik berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks dapat ditanamkan. Pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila sebagai landasan ideal seharusnya memungkinkan kita untuk mengontrol perilaku masyarakat. Pada tingkat aksi publik, media massa, khususnya televisi, setiap hari menyiarkan massa yang penuh kekerasan, dan menjadi sasaran di lokasi-lokasi tertentu seperti pabrik, rumah pribadi, kantor pemerintah, gedung DPR/DPRD, kampus, bahkan tempat ibadah. menghancurkan Begitu juga dengan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Berita tersebut menarik perhatian berbagai pihak, berharap hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tujuannya di sini adalah untuk semakin memperkuat peran Pancasila sebagai ideologi. Pancasila disepakati untuk dijadikan dasar, falsafah dan ideologi bangsa. Nilai yang diagungkan sebagai nilai intrinsik yang dikandungnya berasal dari penggalian nilai-nilai budaya yang sangat pluralistis dan heterogen dan terkandung secara turun temurun sejak zaman dahulu di bangsa Indonesia yang disebut Bineka.

Kenyataannya dewasa ini masyarakat pada umumnya tidak mengetahui atau memahami apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka hidup menurut kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui partisipasi politik, sebenarnya mereka dapat mengintervensi dan mengubah pola pemerintahan nasional yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, di mana pada kenyataannya peran dan kuasa masyarakat berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia ditempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya yang diatur melalui Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan sumber kuasa atas pemerintahan Negara Indonesia adalah atas kehendak rakyat, namun hal ini tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga peran serta masyarakat dalam pemerintahan belum diwujudkan secara maksimal akibat dari kurangnya kesadaran politik masyarakat sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat Simeulue sebagai objek dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mengalami keadaan yang serupa, kesadaran politik masyarakat pada daerah tersebut menjadi isu yang diidentifikasi oleh Kesbangpol Simeulue sebagai isu yang bersifat krusial untuk segera dilakukan penanganan. Atas dasar tersebut, maka kerja sama antara Kesbangpol Siemulue dan Universitas Teuku Umar dilakukan.

Melalui pendidikan, manusia harus mampu memecahkan masalah kehidupan dan mengantisipasi perubahan dan kemajuan di masa depan. Ketidaktahuan politik masyarakat mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak memainkan peran terbesar di negara ini. Oleh karena itu, pendidikan harus diprioritaskan dan direncanakan semaksimal mungkin, karena negara sangat peduli terhadap pendidikan warganya. Pendidikan politik harus memajukan dan mengembangkan lebih jauh pengetahuan kerakyatan dalam kehidupan politik guna meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat merupakan sumber daya manusia potensial yang perlu dikembangkan dan diperbaharui, sehingga mereka juga perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang

layak agar dapat terlibat dalam politik. Masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan agar memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivis berpolitik.

Pendekatan secara kontekstual berkenaan dengan tema Pancasila sebagai sumber etika budaya dalam berpolitik akan dapat menunjukkan arti dan makna secara murni dan komprehensif sehingga dapat mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia ke arah yang dicita-citakan, oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana implementasinya di dalam kehidupan mereka, terutama bagi masyarakat yang ingin terjun di dunia politik. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian ini diselenggarakan guna membawa perubahan positif bagi para pesertanya, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai politik semakin meningkat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendidikan politik ini berlangsung atas kerja sama FISIP Universitas Teuku Umar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh dan dilaksanakan pada 31 Januari 2022 di Kantor Kesbangpol Simeulue. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri dari 25 perempuan dan 20 laki-laki dengan rentang usia 18-45 tahun. Kondisi geografis yang berada di daerah pesisir tentu mempengaruhi minat para peserta terhadap dunia politik. Sebab, wilayah pesisir sering kali warganya cenderung skeptis terhadap isu politik. Minimnya informasi, wawasan, serta pendampingan politik turut berpengaruh terhadap sikap abai para peserta terhadap dunia politik. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri sehingga dibutuhkan pendampingan khusus, berupa sosialisasi akan pentingnya partisipasi politik, dan bagaimana peran yang dapat mereka ambil dalam area tersebut.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Di mana setiap sesinya peserta akan diberikan *pretest* dan *post test* yang sebarakan melalui google *form*. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan pemahaman peserta atas materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan pendidikan politik ini.

Tabel 1. Uraian Kegiatan

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Capaian
1	Senin, 31 Januari 2022 10.00-12.00	Penguatan materi Pancasila sebagai sistem etika dan budaya politik	Peserta memahami tentang fungsi Pancasila sebagai sistem etika dan budaya politik Indonesia
2	Senin, 31 Januari 2022 14.00-16.00	Penguatan materi implementasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam peningkatan etika dan budaya dalam berpolitik	Peserta memahami dan mampu mengidentifikasi atas implementasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam peningkatan etika dan budaya dalam berpolitik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan kegiatan pengabdian yang dilakukan haruslah membawa perubahan positif bagi para pesertanya, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai politik semakin meningkat. Dengan kata lain, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan lebih jauh harapannya adalah mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam

kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah rangkuman pertanyaan yang diberikan kepada peserta pada sesi *pretest* dan *posttest*.

Tabel 2. Daftar Pertanyaan

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda termasuk orang yang beretika dalam semua aspek?		
2	Apakah etika hanya berkenaan dengan baik dan buruk?		
3	Apakah Anda telah beretika secara politik?		
4	Apakah Pancasila sudah menjadi dasar dalam kehidupan politik di Indonesia?		
5	Apakah politik hanya urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan?		
6	Apakah politik itu kejam dan kotor?		
7	Apakah kearifan lokal Aceh sudah terlihat dalam pola pemerintahan?		
8	Apakah pemimpin sudah menyejahterakan masyarakat?		
9	Apakah media sosial bisa dijadikan dasar dalam bertindak secara politik?		
10	Apakah Anda mau berpartisipasi aktif dalam ranah politik?		

Pada saat dilakukan pretest, hampir 60% persen peserta masih terlihat belum memahami mengenai etika dan budaya politik. Berangkat dari serangkaian pertanyaan tersebut pemateri kemudian memulai inti kegiatan ini dengan membahas apa itu etika dan apa bedanya etika dengan moral. Kemudian pemateri juga membahas mengenai sejarah dan kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman bahwa Pancasila tidak hanya sebagai slogan semata melainkan sebuah dasar kepribadian bangsa yang mengarahkan perilaku, keyakinan, nilai, sikap, dan ketrampilan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya materi bergeser ke pembahasan mengenai politik. Hampir 70% persen peserta Pendidikan politik ini beranggapan bahwa politik itu kejam dan kotor. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya angka apatisme politik masyarakat. Masyarakat bahkan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam ranah politik karena mereka merasa bahwa politik hanyalah alat memperkaya kelompok dan pencitraan belaka. Pemahaman inilah yang harus diluruskan, karena hal ini akan berdampak pada runtuhnya tatanan demokrasi dan merajalelanya tokoh politik yang nir-etika dan minim integritas.

Pada tahap ini pemateri mencoba memberikan gambaran baru mengenai tujuan politik yang sejatinya adalah melayani masyarakat dengan ikhlas, membangun daerah menjadi kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belum hadirnya nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam praktik berpolitik di Indonesia menjadikan politik dianggap sebagai salah satu senjata yang paling kejam. Padahal seharusnya politik adalah seni untuk membantu masyarakat meraih kesejahteraan dan menjadi bermartabat melalui pembuatan kebijakan dan advokasi yang positif.



Gambar 1. Pemaparan mengenai etika dan budaya politik oleh pemateri

Kemudian pemateri juga memaparkan elemen penting dalam kehidupan politik Indonesia yakni agama, Pancasila, dan kearifan lokal. Ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat termasuk dalam ranah politik. Agama mengajarkan ketaatan, kepatuhan, ketakwaan, keadilan, amanah, musyawarah, dan kejujuran. Sedangkan kearifan lokal mengajarkan kebiasaan untuk saling menghargai, menghormati, tolong menolong, serta silaturahmi. Pada sisi lain, Pancasila menanamkan nilai toleransi, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketiga elemen inilah yang tanpa disadari saat ini masih dikesampingkan. Politik negeri saat ini masih berkiblat pada budaya barat yang mengakibatkan terjadinya pembelahan politik dan menguatnya politik identitas di Indonesia. Kemudian sebelum menutup sesi ceramahnya, pemateri juga memberikan gambaran mengenai bagaimana menemukan sosok pemimpin yang tepat untuk Aceh dan Indonesia di masa yang akan datang.

Setelah selesai pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, peserta juga terlihat sangat antusias saat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Kemudian sebelum kegiatan ditutup, peserta diminta untuk mengisi posttest yang pertanyaannya sama dengan pretest yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil posttest dapat disimpulkan bahwa hampir 90 persen peserta tertarik untuk turun tangan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik ke depannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaannya kegiatan pengabdian ini terbagi dalam 2 sesi dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Dimana setiap sesinya peserta akan diberikan pretest dan post test yang sebarakan melalui google form. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan membawa perubahan positif bagi para pesertanya, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai politik semakin meningkat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dengan kata lain, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan yang lebih jauh adalah mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

REFERENSI

- Hanafi. 2018. Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *JIPPK, Vol. III*(1): 56-63.
- H.A.W Widjaja. 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta: 3-4
- Hendra Nurtjahyo. 2006. Filsafat Demokrasi, Jakarta, Bumi Aksara: 27-28
- Lestari, Puji., Sunarto, dan Chayono, Hadi. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Sila Kelima dalam Pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. VII* (2): 130-144.
- Mustafa Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung, PT. Citra Aditya: 114
- Paulus Wahana. 1993. Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Kanisius: 77-78
- Rianto, Hadi. 2016. Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. III*(1): 80-91.
- Sudirman, Jedra dan Sarjito, Aris. 2021. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sila Pertama terhadap Kehidupan Beragama. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. VI*(2): 284-291.
- Syamsudin, dkk, 2009. Pendidikan Pancasila (Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan), Yogyakarta, Total Media: 135
- Yusdiyanto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *FIAT JUSTISIA, Vol. X*(2): 259-272).